

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dimana kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakatnya masih dalam taraf sedang atau dalam perkembangan. Maka dari itu, sektor-sektor usaha masyarakat mulai dari usaha kecil, menengah, hingga besar sangat berperan penting dalam perkembangan perekonomian negara.

Namun di sisi lain, dalam menjalankan usahanya, para pelaku usaha juga memiliki beberapa masalah yang dapat menghambat perkembangan usaha mereka. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam dunia usaha adalah modal.

Polak (dalam Riyanto, 2010:18) mengartikan modal sebagai suatu kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Modal merupakan komponen utama dalam menjalankan usaha. Tanpa adanya modal yang memadai, suatu usaha akan susah atau lambat dalam berkembang. Modal dapat berasal dari harta pribadi pelaku usaha yang diinvestasikan ke dalam usahanya atau berasal dari pinjaman pada lembaga keuangan.

Menurut Siamat (1999:5) lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Kegiatan dari lembaga keuangan adalah hanya menghimpun dana dari masyarakat, hanya menyalurkan dana kepada masyarakat atau kedua-duanya yang artinya menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Terdapat dua jenis

lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang berwenang menghimpun dana secara langsung dari masyarakat yang berupa simpanan atau tabungan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat berupa pinjaman atau kredit.

Sedangkan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga keuangan yang tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berupa simpanan atau tabungan, melainkan berupa surat-surat berharga.

Kegiatan bank yang cukup familiar bagi masyarakat dalam pengadaan modal adalah pemberian pinjaman atau kredit. Muljono (2002:12) mengartikan kredit adalah suatu penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dilihat dari jenis penggunaannya, kredit dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kredit modal kerja yang digunakan sebagai keperluan modal usaha peminjam, kredit investasi yang digunakan sebagai investasi produktif, dan kredit lainnya, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah perorangan seperti kredit pemilikan rumah (Tawaf, 1999:248). Selain dapat membantu pengadaan modal bagi pelaku usaha, kredit juga berperan penting dalam kelangsungan hidup bank. Oleh karena

itu, agar kredit yang diberikan mendapatkan sasaran yang tepat, diperlukan sistem pengendalian internal yang baik dan efektif.

Sesuai dalam Pedoman Standart Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum oleh Bank Indonesia dikatakan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya laporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Ikatan Akuntan Indonesia (2014:319.2) menyatakan sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini, antara lain keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undnag-undang dan peraturan yang berlaku dan efektivitas operasi. Jadi sistem pengendalian internal dapat dikatakan baik dan efektif jika perusahaan telah mencapai tiga golongan tujuan tersebut.

Sistem pengendalian internal yang buruk dapat mempengaruhi kinerja bank. Begitu pula dalam pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia, jika sistem pengendalian internal buruk, pemberian kredit tidak akan tepat sasaran dan akan menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Kredit bermasalah jika tidak mendapat tindakan yang benar akan menjadi kredit macet yang mana merugikan perusahaan.

Kredit bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian (Kuncoro dan Suhardjono, 2002:462). Sedangkan kredit macet merupakan keadaan nasabah yang sudah tidak sanggup membayar angsuran pokok maupun bunga selama lebih dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan. Apabila kolek kredit sudah pada tahap kredit macet, bank dapat menggunakan jaminan yang dijaminan oleh debitur.

Dalam menghindari kredit masalah penerapan sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit sangat penting bagi kelangsungan hidup PT Bank Rakyat Indonesia, maka dari itu, penulis tertarik melakukan studi lapang mengenai penerapan sistem pengendalian atas prosedur pemberian kredit.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan dari studi lapang adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kertajaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Adapun manfaat dari studi lapang yang dilakukan adalah dapat berguna sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan mengenai penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit, juga sebagai pertimbangan dalam meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup atau pembatasan yang dimaksudkan agar dalam pembahasan tugas akhir tidak keluar dari pembahasan dan sesuai dengan yang diharapkan dan

dimaksudkan penulis, untuk itu agar pembahasan tidak menjadi terlalu luas, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kertajaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dalam suatu penelitian adalah mendapat data-data yang akurat. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas pengamatan terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan merasakan secara langsung fenomena yang diteliti sehingga mendapat pengetahuan dan informasi mengenai fenomena tersebut sebagai bahan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai prosedur dan penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan mencari informasi yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan antara dua orang atau lebih yang meliputi dua komponen yaitu narasumber dan pewawancara. Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk menggali informasi lebih dalam mengenai suatu objek melalui narasumber yang tepat dan terpercaya. Metode wawancara dilakukan pada bagian kredit atau staff *account officer* (AO).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas pengumpulan data atau bukti yang berasal dari sumber yang akurat sesuai dengan hal yang diteliti guna menyempurnakan karya ilmiah. Dokumen-dokumen yang mendukung penelitian penulis antara lain bagan struktur organisasi dan daftar dokumen persyaratan pengajuan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kertajaya

